



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Januari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
UNIT KERJA : DINAS LINGKUNGAN HIDUP

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ERIEK KUSUMA
2. Jabatan : SEKRETARIS
3. NHK : 727080

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 1.620.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 144 m²/72 m² di KAB / KOTA BANYUMAS, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m²/36 m² di KAB / KOTA BANYUMAS, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 149 m²/50 m² di KAB / KOTA BANYUMAS, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
4. Tanah Seluas 1892 m² di KAB / KOTA BANYUMAS, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
5. Tanah Seluas 482 m² di KAB / KOTA BANYUMAS, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
6. Tanah Seluas 1050 m² di KAB / KOTA BANYUMAS, HASIL SENDIRI Rp. 320.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 101.000.000**

1. MOBIL, DAIHATSU F600RV GMDFFJ / MINIBUS Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
2. MOBIL, MAZDA MR 90 1.4 Tahun 1996, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
3. MOTOR, HONDA NF 100 SL / SOLO Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. ----**

D. SURAT BERHARGA **Rp. ----**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp. 985.965.481**



F. HARTA LAINNYA

Sub Total

Rp. ----

Rp. 2.706.965.481

III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 2.706.965.481

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.